

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2014-2023” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa laju pertumbuhan ekonomi di 6 provinsi sumatera yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera utara tidak signifikan dengan tingkat kemiskinan, dikarenakan kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan karena belum mampu dinikmati secara merata oleh masyarakat berpendapatan rendah
2. Bahwa IPM di 6 provinsi yaitu Aceh, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera utara, berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, karena peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pendapatan perkapita akan memperluas kemampuan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan.

5.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian ini, beberapa saran dapat disampaikan baik dari sisi kebijakan pembangunan daerah maupun pengembangan penelitian akademik ke depan:

1. Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didorong ke Arah yang Lebih Inklusif

Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi belum mampu menurunkan kemiskinan secara efektif. Sehingga, pemerintah daerah di Pulau Sumatera perlu memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, di mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor padat karya

seperti pertanian, industri kecil dan menengah, serta pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, perlu diperkuat dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif lokal sebagai motor penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

2. Peningkatan IPM Harus Diikuti dengan Penciptaan Kesempatan Ekonomi Nyata

Meskipun IPM mengalami peningkatan setiap tahun, pengaruhnya terhadap kemiskinan belum signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja produktif. Peningkatan IPM tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan layanan dasar, tetapi juga harus memperhatikan keterkaitan antara pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Pemerintah dapat memperluas program pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pemberdayaan tenaga kerja muda agar peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat langsung berdampak pada penurunan kemiskinan.

3. Pemerataan Pembangunan Antarprovinsi Perlu Menjadi Fokus Utama

Perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi di Pulau Sumatra menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan wilayah. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kebijakan desentralisasi yang lebih berpihak pada daerah dengan IPM dan PDRB rendah seperti Aceh, Bengkulu, dan Lampung. Pemerataan infrastruktur, akses modal, serta peningkatan layanan publik harus menjadi prioritas agar daerah-daerah tertinggal dapat mengejar ketertinggalan ekonomi dan sosialnya.

4. Integrasi Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan IPM belum berjalan sinergis dalam menekan kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara aspek ekonomi dan manusia. Pemerintah perlu mengadopsi strategi *growth with equity*, yaitu pertumbuhan yang diiringi dengan pemerataan hasil pembangunan. Hal ini

dapat diwujudkan dengan memperkuat koordinasi antarinstansi dan memperhatikan keterpaduan antara kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

5. Arah Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memasukkan variabel tambahan yang berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan, seperti ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio, upah minimum regional, investasi publik, serta belanja sosial pemerintah daerah. Selain itu, penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran kemiskinan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek kuantitatif tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan kelembagaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kebijakan pembangunan berdampak secara nyata terhadap kehidupan masyarakat miskin di Pulau Sumatera.

5.3 Implikasi Kebijakan

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan di Pulau Sumatera. Mengingat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap kemiskinan, maka kebijakan pembangunan perlu diarahkan secara lebih terarah dan komprehensif. Adapun implikasi tersebut sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Belum Berhasil Menekan Kemiskinan

Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera, sehingga peningkatan PDRB selama periode penelitian belum mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung bersifat kurang inklusif, di mana keuntungan lebih banyak dinikmati oleh sektor-sektor berskala besar yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja miskin. Oleh karena itu,

pemerintah daerah perlu merumuskan strategi pertumbuhan yang lebih inklusif, antara lain dengan memperkuat sektor-sektor padat karya seperti pertanian, UMKM, industri kecil, serta sektor informal yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan investasi publik di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Aceh, Bengkulu, dan Lampung, perlu didorong untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih produktif.

2. Peningkatan IPM Terbukti Efektif Mengurangi Kemiskinan

Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan IPM terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti bahwa peningkatan IPM mampu mengurangi kemiskinan secara nyata. Implikasi dari temuan tersebut adalah perlunya pemerintah terus memperkuat kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta standar hidup masyarakat. Pemerintah daerah dapat memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan layanan kesehatan primer, serta memperkuat daya beli masyarakat melalui program bantuan produktif. Selain itu, perlu dilakukan pemerataan pembangunan manusia antarprovinsi, sehingga peningkatan IPM tidak hanya terpusat pada daerah maju seperti Sumatera Utara dan Jambi, tetapi juga menyentuh wilayah dengan IPM yang masih rendah.

3. Sinergi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia belum sepenuhnya berjalan seiring dalam menurunkan kemiskinan. Perekonomian yang tumbuh tanpa peningkatan kualitas SDM tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Sebaliknya, peningkatan IPM membutuhkan dukungan ekonomi agar manfaatnya lebih optimal. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang integratif antara pembangunan ekonomi dan manusia. Konsep *growth with equity* perlu diterapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil

melalui pemerataan pendidikan, penyediaan infrastruktur dasar, serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi.

4. Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal

Ketimpangan antarprovinsi di Pulau Sumatra menunjukkan bahwa beberapa daerah dengan PDRB tinggi tetap memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada daerah tertinggal. Pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi lokal melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif yang banyak melibatkan masyarakat miskin.

